

Kepemimpinan Efektif dalam Membangun Kota Peradaban Toleransi: Benchmark Jawa Tengah

Taufan Hunneman , **Seta Basri** ²

^{1,2} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia*

Abstrak

Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu pilar penyangga Republik Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk melihat apakah masih terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpin politik dalam upayanya mempertahankan dan mengoperasionalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lokus studi adalah perilaku politik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bukan dengan tujuan bahwa yang bersangkutan adalah representasi dari Bhinneka Tunggal Ika melainkan lebih kepada kehadiran aneka indikator bahwa memang konsep Bhinneka Tunggal Ika masih hidup atau dipertahankan untuk terus hidup di wilayah banyak penduduk seperti Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah content-analysis dengan pencarian data yang dianggap kredibel dari internet untuk kemudian ditriangulasi agar mampu menjelaskan permasalahan penelitian. Peneliti menyimpulkan adanya empat hal. Pertama, Bhinneka Tunggal Ika bukan semboyan mati melainkan semboyan hidup. Kedua, Jawa Tengah dapat disebut sebagai kota yang mampu mengayomi kepentingan penduduknya. Ketiga, toleransi beragama bukan sekadar merupakan agenda aksi melainkan implementatif sifatnya bagi setiap kepala daerah. Keempat, perlu adanya upaya serius guna menyusun platform masa depan Indonesia yang menjadikan toleransi proporsional sebagai jati diri yang harus lestari.

Kata Kunci: *Bhinneka Tunggal Ika, Toleransi, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Keragaman*

Abstract

Unity in Diversity is one of the pillars supporting the Republic of Indonesia. This research seeks to see whether there are still efforts made by political leaders in their efforts to maintain and operationalize the motto of Bhinneka Tunggal Ika. The focus of the study is the political behavior of Central Java Governor Ganjar Pranowo, not with the aim that he is a representation of Bhinneka Tunggal Ika but rather the presence of various indicators that indeed the concept of Bhinneka Tunggal Ika is still alive or maintained to continue to live in a populous region such as Central Java. The research method used is content-analysis with the search for data that is considered credible from the internet and then triangulated in order to be able to explain the research problem. The researcher concluded four things. First, Bhinneka Tunggal Ika is not a dead motto but a living motto. Second, Central Java can be called a city that is able to protect the interests of its residents. Third, religious tolerance is not just an action agenda but implementative in nature for each regional head. Fourth, there needs to be a serious effort to develop a platform for the future of Indonesia that makes proportional tolerance as an identity that must be preserved.

Keywords: *Working Capital Management and Profitability Efficient Use of Funds*

Copyright (c) 2022

 Corresponding author : Ayu Ratna Sari

Email Address : Ayhuasiz13@gmail.com

PENDAHULUAN

Ganjar Pranowo, di samping tentunya Anies Rasyid Baswedan saat artikel ini disusun adalah Calon Presiden (Capres) kendati konfigurasi partai politik pengusungnya masih harus menunggu pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum. Artikel ini tidak akan mempermasalahkan bagaimana political bargaining yang mengelindani kedua tokoh tersebut dikarenakan masih merupakan fenomena dan bukan noumena. Jika hal tersebut dilakukan maka saat artikel ini tengah dalam proses penerbitan maka konfigurasi partai politik pendukung yang begitu dinamis diasumsikan akan cepat berubah.

Artikel ini hendak menyoroiti hakikat dari Pilpres itu sendiri. Memilih Presiden (dan Wakil Presiden) ibarat memilih satu dari sejumlah driver yang dinilai cocok untuk mengendarai kendaraan yang spesifik. Ada driver yang cocok dan kompeten dalam mengendalikan truk gandeng, tetapi manakala ia diinstruksikan mengendarai sebuah BMW seri terbaru ternyata membuat penumpangnya ketakutan. Masalah dari driver tersebut adalah pemahamannya atas kendaraan yang harus ia kendalikan. Seorang moto-biker yang baik belum tentu pula seorang driver mikrolet yang baik.

Demikian pula untuk Pilpres 2024, publik akan memilih seorang “pilot” dan “kopilot” yaitu Presiden dan Wakil Presiden, yang akan mengendalikan tanah air dan bangsa yang besar serta beragam ini. Karakter Indonesia sangat khas yaitu terdiri atas sangat banyak pulau, beragam etnis berikut sub-subnya, beragam agama dan kelompok-kelompok di dalamnya, perbedaan karakter antar daerah yang saling berbeda satu sama lain, juga tidak dipungkiri parokialisme budaya politik masih banyak menggejala terutama di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, dan dua “Maluku.”

Salah satu persoalan yang dianggap selalu belum tuntas adalah pengelolaan keragaman masyarakat di Indonesia. Dapat diambil contoh adalah masalah posisi Islam dalam sistem politik Indonesia yang sejak awal persiapan kemerdekaan hingga satu dekade tetap menjadi masalah seperti terdapat dalam studi Boland. Permasalahan ini menciptakan bifurkasi politik di Indonesia dengan mana sebagian pihak menyatakan bahwa Sila Pertama yaitu “Ketuhanan Yang Mahaesa” adalah final dan tidak bertentangan dengan konsep Tauhid di dalam Islam. Pendukung solusi final ini selain kelompok non Muslim juga adalah kelompok Islam Moderat di Indonesia. Pada lain pihak tidak dipungkiri ada pula kelompok yang tidak menerima bahwa bunyi Sila Pertama hanyalah itu melainkan harus ditambah “ ... dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.” Argumentasi ini dilontarkan oleh para politisi Islam dengan argumen cukup meyakinkan seperti dapat kita simak dalam studi B.J. Boland.

Tidak hanya masalah agama, etnisitas dan teritori wilayah juga kerap menjadi permasalahan yang sifatnya bukan sekadar masalah pembagian kesejahteraan semata melainkan pula sentimen xenophobia, perebutan teritorial, kita-mereka, seperti secara ringkas dapat dipahami dalam artikel Seta Basri mengenai munculnya 8 provinsi baru di Indonesia pasca transisi politik 1998. Aristoteles menyebut manusia adalah zoon politikon atau binatang politik karena memiliki sejumlah keserupaan dominasi-submisi, penguasaan teritori, nepotisme-nativistik, pengkhianatan, pembentukan aliansi dan koalisi, serta kehendak mengendalikan resources oleh pihak terkuat. Demikianlah maka di dalam setiap Pilpres isu-isu primordial seperti Islam-Bukan

Islam, Jawa-Bukan Jawa, lebih memicu emosi publik dikarenakan pewarisan dari proses evolusi manusia yang inheren di dalam genetika populasi.

Persoalan yang bersifat primordial hasil kembangan dari proses evolusi manusia bukannya tanpa solusi. Indonesia sejak awal merdeka telah menyebarkan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya “berbeda-beda tetapi tetap satu jua.” Namun, slogan atau dalam bahasa Yuval Noah Harari dalam Homo Deus disebut “Imajinasi Kolektif” tetap belum merata dipersepsi baik oleh seluruh rakyat Indonesia terlebih lagi para politisi. Para politisi inilah yang umumnya memanfaatkan masalah yang bersifat primordial demi keuntungan politis mereka. Jargon-jargon seperti “asli Minangkabau” atau “putra daerah” juga salah satu pasal di UU Otonomi Khusus Papua bahkan menyebutkan bahwa Gubernur Papua haruslah memiliki ras Melanesia.

Dengan ini diperlukan seorang driver yang mampu menjaga kebhinnekaan Indonesia. Kebhinnekaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ia harus diterima dan disikapi secara bijaksana. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mencari solusi bagaimana seharusnya seorang Capres dapat melakukan quality-assurance agar kebhinnekaan tidak lantas berujung pada disintegrasi politik.

Namun, upaya pencarian solusi ini tidak bisa abstrak melainkan perlu model konkrit. Di antara kedua pilihan Capres yang paling mungkin yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan, penulis cenderung akan menggunakan yang pertama sebagai model. Alasannya bukan karena Ganjar Pranowo lebih baik dari Anies Rasyid Baswedan melainkan sejumlah pertimbangan. Pertama, Ganjar Pranowo hampir dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan mana ia harus memimpin para bupati dan atau walikota yang tidak ia tunjuk atau angkat melainkan dipilih oleh rakyat di teritori tersebut. Potensi bagi terciptanya asimetri kebijakan sangat mungkin mengingat partai-partai koalisi pengusung setiap bupati/walikota belum tentu merupakan “kawan” dari partai-partai koalisi pengusung Ganjar. Pada lain pihak, Anies Rasyid Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta dengan 6 wilayah administrasi yang para kepalanya ia angkat secara prerogatif. Dengan demikian potensi asimetri kebijakan di DKI Jakarta diasumsikan akan jauh lebih kecil ketimbang di Jawa Tengah. Selain itu, kompleksitas masalah yang dihadapi Ganjar tentu lebih besar ketimbang Anies mengingat yang pertama hampir 10 tahun menduduki posisi Gubernur sementara yang kedua hanya 5 tahun.

Kedua, Jawa Tengah adalah wilayah dengan jumlah penduduk cukup besar yaitu 37,49 juta jiwa pada Juni 2022. Sementara di tahun yang sama jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 10,64 juta jiwa. Emile Durkheim menyebut physical density akan mendorong terciptanya moral density. Maknanya, tuntutan dan kepentingan di wilayah dengan populasi lebih banyak pada akan selalu lebih tinggi ketimbang yang kurang banyak. Kesulitan Ganjar tentu akan lebih besar mengingat sebaran penduduk lebih terpecah karena luas Jawa Tengah adalah 34.334 km persegi. Ini jauh lebih besar ketimbang DKI Jakarta yang hanya memiliki luas 664 kilometer persegi.

KAJIAN PUSTAKA

Ganjar Pranowo adalah seorang pemimpin politik kendati terbatas di Jawa Tengah, sebuah provinsi di Indonesia. Namun, dalam melakukan kegiatan politik Ganjar mengembangkan suatu kepemimpinan yang ternyata dinyatakan prefer oleh rakyat Jawa Tengah kendati jumlah suaranya turun dari periode ke-1 ke periode ke-2. Untuk itu penulis akan menjabarkan 3 buah teori mengenai kepemimpinan politik

dengan rincian dua teori per se pada masalah politik sementara yang terakhir mengkaitkan antara problem seorang pemimpin lahir dari proses demokrasi, tetapi pada lain pihak ia harus mengendalikan birokrasi yang sifatnya hirarkis.

Thomas M. Magstadt mengembangkan 4 tipe kepemimpinan politik. Pertama adalah *Negarawan* dengan karakteristik utama mengejar kebaikan umum, memiliki kebijakan praktis, memiliki keahlian politik, memiliki kesempatan luar biasa, dan "nasib baik." Kedua adalah *Demagog* dengan karakteristik utama kerap mengeksploitasi prasangka publik, kerap melakukan distorsi atas kebenaran, gemar mengumbar janji-janji manis untuk memperoleh kuasa politik, tidak canggung untuk menggunakan metode yang dinilai kurang bermoral, memiliki daya tarik yang besar terhadap masyarakat banyak, dan suka berpura-pura peduli atas keadilan dan kebaikan umum dengan tujuan memperoleh jabatan.

Ketiga adalah *Politisi Biasa* dengan karakteristik utama tidak punya visi dan bakat yang cemerlang, hidup hanya untuk day-to-day dalam mengatasi tekanan dan hambatan yang dialami dalam keseharian, kendati hendak berbuat sesuatu yang baik selalu kesulitan menjaga isu-isu moral dan etika secara tegas, sulit mengatasi risiko politik, kendati umumnya mereka tidak korup tetapi mudah bagi mereka untuk disuap, dan mereka ini tidak lebih baik atau lebih buruk dari manusia lainnya (biasa-biasa saja). Keempat adalah *Citizen Leader* dengan karakteristik utama punya pengabdian unik atas masyarakat, punya magnet personal di dalam dirinya, dan keberaniannya di atas rata-rata sehingga menarik orang-orang untuk menjadi pengikutnya.

Selain Magstadt yang mewakili genre ilmuwan politik moderen, tipe-tipe kepemimpinan politik juga pernah dikategorisasi oleh Marcus Tullius Cicero, seorang politisi dan pengacara Romawi yang hidup sezaman dengan Julius Caesar. Cicero adalah seorang realis politik yang dengan sederhana membagi tipe pemimpin politik menjadi dua saja yaitu *Optimates* dan *Populares*. *Optimates* bermakna yang terbaik, karena kerap menawarkan kebijakan demi memperoleh persetujuan orang-orang terbaik atau *Optumus Quisque*. *Optimates* juga memandang bahwa kemerdekaan yang muncul tanpa adanya respek atas sejumlah nilai atau dignitas adalah penyelewengan atas kebebasan. Sementara itu *Populares* diidentifikasi Cicero sebagai "Si Populis" yang kerap menawarkan kebijakan guna menyenangkan jumlah terbanyak kendati "kesenangan" itu berpotensi meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Para *Populares* juga disebut Cicero sebagai menderit kelainan psikologi karena secara pemikiran mereka kerap keliru bernalar atau *propter insitum quendam animi furorem*.

B. Guy Peters seorang teoretisi administrasi publik yang banyak pula melakukan studi atas perilaku para pemimpin politik yang lahir dari demokrasi tetapi diwajibkan memimpin birokrasi, dengan mana Peters sendiri berada dalam arus konsep baru pelayanan publik yang dikenal sebagai *New Public Management*. Begitu seorang *Capres* terpilih dalam sebuah *Pilpres* maka secara otomatis ia menjadi Kepala Pemerintah atau dengan kata lain ia harus memimpin roda birokrasi negara. Sebab itu, *Capres* terpilih tersebut harus langsung mengadaptasi aneka kebiasaannya yang cenderung anti-birokrasi menjadi mampu menjadi bagian dan menggerakkan birokrasi. Walau bagaimanapun, seorang Presiden tidak akan bisa menyusun kurikulum tingkat Sekolah Dasar sekalipun tanpa didampingi para birokrat yang memang terbiasa melakukan penyusunan kurikulum.

Peters membagi adanya 5 peran yang dapat dimainkan oleh seorang pemimpin politik wilayah produk suatu Pemilu yaitu: (1) the bureaucrat; (2) the manager; (3) the policy-maker; (4) the negotiator; dan (5) the democrat.

Sebagai the bureaucrat maka pemimpin daerah kendati bukan seorang birokrat mengubah diri menjadi seorang birokrat yaitu bekerja sesuai karakteristik birokrasi Weberian yaitu bekerja secara hirarkis, imparisial, ekspertis, dan bekerja berdasarkan dokumen dan atau data. Namun, rata-rata para Capres Indonesia tahun 2024 bukanlah para birokrat sehingga peran seperti ini sulit untuk dikembangkan.

Sebagai the manager maka pemimpin daerah dapat memanfaatkan arus New Public Management karena birokrasi-birokrasi yang sudah menerapkannya cenderung menekankan bahwa birokrat harus mampu mengelola birokrasi agar bersifat decisive and autonomous public management. Konsep ini banyak diambil dari birokrasi swasta dengan mana inovasi selalu cepat diadaptasi dan para pimpinan mengurangi jarak terhadap mereka yang dipimpin.

Sebagai the policy-maker maka inilah peran yang paling dekat dengan karakter para pemimpin politik. Mengenai ini Peters menulis " ... the traditional policy role for the public service was to serve as advisors for political leaders." Peran ini dapat saja dimainkan seorang pemimpin daerah harus dekat dengan para birokrat yang umumnya tersebar di aneka Dinas-dinas di sekelilingnya. Dalam membuat kebijakan ia harus mau mendengarkan pendapat para kepala dinas terkait di dalam menyelesaikan suatu persoalan. Walau bagaimanapun pemimpin daerah adalah politisi yang terbiasa berpikir general bukan teknis-spesifik. Tanpa pelibatan para birokrat maka manakala seorang pemimpin daerah membuat kebijakan akan terkesan "konyol."

Sebagai the negotiator maka pemimpin daerah pasti banyak bersentuhan dengan aneka stake-holder yang masing-masingnya cukup berbeda. Pemimpin daerah akan berhadapan dengan pengusaha kapal penangkap ikan, serikat nelayan penangkap ikan, para pimpinan yayasan pendidikan, federasi guru swasta, dengan mana satu stake holder dengan lainnya memiliki kepentingan yang bersilangan. Pemimpin daerah harus mampu menjalankan peran sebagai negosiator dalam pengertian jika terjadi pertabrakan kepentingan maka ia harus mampu berdiri di tengah secara proporsional bergantung pada kasus faktualnya.

Sebagai the democrat maka pemimpin daerah utamanya adalah mengantisipasi fenomena melemahnya kepercayaan masyarakat kepada demokrasi. Demokrasi yang dinilai tidak banyak menghasilkan pejabat politik yang kompeten mendorong apatisme masyarakat. Untuk itu maka pemimpin daerah harus mampu menghidupkan roda birokrasi, memastikannya menjalankan fungsi-fungsi utamanya yaitu menjalankan manajemen publik sesuai dengan apa yang ia kampanyekan dalam Pilkada

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan aneka data yang terdapat di sejumlah website yang dianggap kredibel dan jelas penulisnya. Permasalahan penelitian akan diurai secara satu per satu dengan metode triangulasi. Metode ini mirip dengan saat seorang

wartawan melakukan wawancara secara cover both side sehingga para pembaca dapat menilai sendiri dan menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Cicero, *Optimates* berbeda dengan *Populares* karena yang pertama memiliki nilai-nilai yang dianggap tinggi dan berusaha diejawantahkan ke dalam realitas politik keseharian. Sebaliknya, Cicero menilai bahwa *Populares* semata-mata memperturutkan kesenangan publik kendati hal tersebut justru nantinya malah akan meruntuhkan sokoguru bangsa tersebut. Dalam konteks ini, *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan sesuatu yang sulit ditawarkan atau dielakkan dari realitas masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, seorang Padang tentu memiliki karakter berbeda dengan seorang Sunda. Tidak ada yang lebih baik dari keduanya karena mereka merepresentasikan warisan genetika yang berbeda. Demikian pula *raison d'être* berdirinya *Nahdlatul Ulama* berbeda dengan berdirinya *Muhammadiyah*, yang hingga kini pun kerap memiliki perhitungan berbeda mengenai kapan puasa Ramadhan dimulai dan kapan diakhiri. Sebab itu maka *Bhinneka Tunggal Ika* adalah sebuah keniscayaan, bahwa suatu bangsa diciptakan bersuku-suku dan berkaum-kaum tidak lain agar mereka saling mengenal.

Apakah Ganjar Pranowo dalam kasus *Bhinneka Tunggal Ika* masuk ke dalam kategori *Optimates* atau *Populares*? Penulis tidak akan pernah dapat menjawab pertanyaan ini karena nantinya khawatir terjebak ke dalam sikap partisan. Hal maksimal yang paling mungkin dilakukan adalah mempelajari indikasi, bahwa apabila *Bhinneka Tunggal Ika* diasumsikan sebagai variabel maka ia harus memiliki alat ukur yaitu indikator. Persoalannya kemudian adalah apakah indikator-indikator *Bhinneka Tunggal Ika* terimplementasi dalam kurang lebih 10 tahun masa Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Dalam penelitian yang berlangsung dalam masa pandemi Covid-19 ini Nurdiyani menjelaskan bahwa Maklumat yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo merupakan realisasi sikap gotong-royong. Dalam menyampaikan maklumat tersebut Ganjar mengajak rakyat Jawa Tengah untuk bergotong-royong melawan dampak Covid-19, tetapi berbeda dengan maklumat-maklumat yang disampaikan oleh individu atau lembaga lain, maklumat Ganjar disampaikan seolah-olah sedang mengajak berbicara atau menasihati mitra tuturnya. Ganjar dalam menyampaikan maklumatnya seolah bukan sedang memaparkan seperangkat larangan dan sanksi untuk masyarakat. Akhirnya Nurdiyani menyimpulkan bahwa dalam menyampaikan maklumatnya, Ganjar lebih mengedepankan perasaan yang direalisasikan ke dalam diksi-diksi yang dipergunakannya. Nurdiyani menulis "pengedepanan perasaan dalam menghadapi rakyat merupakan salah satu karakter pemimpin. Tidak ditemukannya swearing (umpatan) di dalam teks mengindikasikan sikap yang baik dari seorang gubernur."

Selain itu pula dalam sebuah penelitian yang dilakukan Pramelani dan Tri Widyastuti terungkap dalam survey yang mereka lakukan bahwa bagi kalangan milenial calon presiden 2024 harus dilihat dari pengalaman kepemimpinan, mempunyai wawasan luas, kinerja yang pernah dicapai, memiliki track record prestasi yang jelas dan bertanggung jawab terhadap rakyat, tegas terhadap peraturan yang dibuat dalam melayani masyarakat, bijaksana dalam pengambilan keputusan, kepercayaan terhadap integritas dalam memimpin, dan berjiwa nasionalis. Kedua peneliti menyodorkan 10 nama orang-orang yang berpotensi sebagai Capres 2024 yaitu Puan

Maharani, Airlangga Hartarto, Tri Rismaharini, Eric Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Hasilnya persepsi positif teratas ditempati Ganjar Pranowo dengan 32,8%, disusul berturut-turut oleh Anies Baswedan (26,9%), Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto sama-sama 11,9%, sementara lainnya di bawah 10%.

Dua hasil penelitian menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo untuk sementara waktu menunjukkan dua hal. Pertama, gaya bahasa yang dikembangkan olehnya adalah inklusif dalam arti ia tidak membatasi antara dirinya selaku pemimpin dengan mitra tuturnya yaitu rakyat Jawa Tengah. Kedua, dari aneka calon presiden lainnya maka Ganjar Pranowo mendapatkan penilaian paling tinggi, kendati tidak melewati nilai absolut 51%, di dalam memperoleh apresiasi kaum milenial yang nantinya banyak menentukan split-decision dalam Pilpres 2024.

Kembali ke dalam konteks apakah Ganjar Pranowo, sebagai Gubernur Jawa Tengah memiliki penilaian tinggi terhadap semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu dapat digunakan aneka sumber yaitu dari media sosialnya secara langsung dan sumber-sumber sekunder yaitu aneka tanggapan dan atau hasil-hasil penelitian mengenai hal tersebut.

Dalam sebuah Tweetnya, Ganjar menyatakan "Bhineka Tunggal Ika itu sunatullah. Perbedaan itu tidak perlu disama-samakan tapi untuk dipersatukan!" Hal tersebut dinyatakan Ganjar pada saat ia mengukuhkan Pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 2022. Kemudian dalam kesempatan lainnya Ganjar mengungkapkan ia tidak ingin Pemilu dijadikan alat untuk memecah-belah persatuan bangsa. Dengan bahasa asertif ia menyatakan "Jangan menyakiti kelompok per kelompok, jangan kau bawa suku, jangan kau bawa golongan, jangan kau bawa isu agama. Buat Indonesia itu given."

Dalam masa kepemimpinannya, Ganjar mencanangkan Jawa Tengah menjadi Kampung Bhinneka. Dalam acara tanggal 14 September 2019 yang bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja itu, Ganjar menyatakan "Hoaks, ujaran kebencian, cacimaki, politisasi SARA, berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan Indonesia ... Bangsa ini tak boleh terserak, tercabik dan terdegradasi hanya mempersoalkan perbedaan dan keragaman. Kita harus lawan itu ... jangan biarkan masyarakat Indonesia saling bermusuhan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air ... Kita harus mampu menunjukkan kepribadian sebagai bangsa Indonesia ... kita punya kepribadian dalam kebudayaan ... memiliki semangat gotong-royong, toleransi, musyawarah untuk mufakat dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun kebersamaan ... Itulah sesungguhnya pondasi jatidiri ... bangsa Indonesia."

Selaku Gubernur Jawa Tengah, Ganjar juga masuk ke ruang publik Islam kalangan Nahdlatul Ulama. Dalam peringatan Hari Santri Nasional 2019, ribuan santri Kota Tegal yang berasal dari berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan organisasi massa Islam menggelar upacara Hari Santri Nasional.

Seperti diketahui bersama, asal-usul diadakannya Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober adalah sebagai hasil pertemuan para ulama se-Jawa dan Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya yang kemudian memunculkan Resolusi Jihad. Inti dari resolusi tersebut adalah bahwa bagi mereka yang beragama Islam wajib untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat peringatan Hari Santri Nasional tersebut termaktub 5 ikrar yaitu bahwa "santri siap berdiri sebagai garda terdepan untuk melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-

undang Dasar (UUD) 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika serta konstitusi lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi Kemerdekaan dan Resolusi Jihad NU."

Tidak hanya Nahdlatul Ulama, Ganjar pun berupaya mendekati kalangan Muhammadiyah. Pada tanggal 26 November 2020, yaitu dalam acara Gebyar Milad ke-4 SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, ia berupaya menarik perhatian peserta remaja dengan cara mengenakan pakaian adat Ponorogo Jawa Timur. Audiens adalah publik Jawa Tengah, tetapi Ganjar menggunakan pakaian khas provinsi lain. Ganjar pun melihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika harus diperkenalkan sejak dini. Sebab itu ia menggunakan penampilan yang diasumsikan akan menarik bagi para anak dan mereka tertarik untuk mendengarkan pesan Bhinneka Tunggal Ika tersebut.

Perhatian kepada Muhammadiyah pun ditunjukkan Ganjar saat ia melakukan silaturahmi Idul Fitri 1443 H ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diterima oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Dalam silaturahmi tersebut dibahas mengenai peran agama dalam kehidupan kebangsaan, di mana Indonesia berdasar Pancasila, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa, dan dalam konstitusi dasar Pasal 29 UUD 1945 agama diakui sebagai bagian integral konstitusional. Dalam kesempatan dialog dengan Ganjar Pranowo, bahkan Haedar Nashir menyatakan "Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat keragaman harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dengan semangat untuk bersatu akan membawa Indonesia menjadi negara yang berkemajuan."

Dalam acara tersebut Ganjar menyatakan komitmennya atas Bhinneka Tunggal Ika "... setiap Kamis keempat, di Pemprov Jateng itu kami memakai baju adat Nusantara. Jadi adik-adik kalau hari ini datang ke Pemprov, akan melihat beragam baju adat nusantara." Dalam komunikasi ini terdapat substansi yaitu bahwa dasar dari kebijakannya tersebut adalah agar bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah, menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah faktual di Indonesia. Sebelumnya, saat dirinya dalam proses perdebatan Cagub-Cawagub Jawa Tengah melawan pasangan Sudirman-Ida Fauziah dengan Tema Pendidikan Karakter, Ganjar dan pasangan Cawagubnya, Taj Yasin, menyatakan dengan tegas bahwa budayawan harus diajak bekerja sama guna menambah literasi bahwa Jawa Tengah adalah "bentengnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika."

Salah satu hal yang kerap terjadi adalah intoleransi saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk melakukan counter terhadap hal tersebut, menjelang Nataru tahun 2022 Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk menunjukkan toleransi beragama. Ganjar menyatakan "tentu saya mengajak seluruh masyarakat perayaan Natal besok, kita bisa saling menghormati agama apapun, kalau bisa justru kita turut bergembira ria. Yang ritual, mereka beribadah kita hormati, kita turut merayakan dengan ikut bersuka ria meskipun tentu saja tidak ikut ibadahnya."

Dalam keseriusannya mengenai Bhinneka Tunggal Ika, Ganjar Pranowo pun melakukan studi banding ke Kampung Pancasila yang terdapat di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut Ganjar menyatakan "Ini menarik. Satu tempat yang sempat viral karena ada cerminan rumah-rumah ibadah itu ada di sini. Ini kan cerminan Indonesia." Kampung Pancasila sendiri merupakan destinasi wisata religi dengan mana di dalamnya terdapat 5 bangunan ibadah yaitu mushalla, gereja, kelenteng, pura, dan wihara. Kampung Pancasila sendiri didirikan oleh K.H. Ali Mursyid sejak tahun 1980. Ganjar juga menyatakan "kalau toleransi itu ya seperti ini, yang mesti kita rawat, yang mesti kita

jaga. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kita jadi satu, satu tanah air, Indonesia Raya."

Sebagai mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ganjar tidak hanya dekat dengan kalangan nasionalis. Istrinya adalah putri seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Namun, Ganjar pun menjalin hubungan dengan ormas besar Islam lainnya yaitu Muhammadiyah. Hal inilah kemungkinan besar yang memicu terjadi Istighosah ribuan ulama di Madura agar Ganjar maju di Pilpres 2024. Istighosah tersebut digelar dengan sebutan Istighosah Kebangsaan dalam rangka mendukung dan mendoakan Ganjar. Ketua Himpunan Lora Madura, K.H. Jakfar Shodiq Fauzi menyatakan bahwa mereka mendukung Ganjar karena dinilai merupakan figur pemimpin yang sederhana, kuat, dekat dengan alim ulama dan umat Islam. K.H. Jakfar juga menyatakan bahwa Ganjar merupakan sosok yang berkomitmen terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebenarnya apa yang dijadikan political exercise oleh Ganjar Pranowo mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika bukan tanpa alasan yang jelas. Pada tahun 2011 Ganjar menyatakan bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa hingga kini belum terealisasi dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial. Hal ini dinyatakan Ganjar dalam Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan Pengurus Daerah XIV GM FKPPi dengan tema Revitalisasi Pancasila Menyongsong Era Pasifik." Dalam kesempatan tersebut ia melansir survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa persentase masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya sekitar 67-78 persen.

Perbedaan tanggal Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah disikapi Ganjar Pranowo sebagai manifestasi dari Bhinneka Tunggal Ika secara faktual. Ganjar menyatakan "jadi jangan hanya bicara bedanya saja tapi bagaimana mempersatukan perbedaan itu menjadi sebuah ikhtiar anak bangsa." Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun sepakat dengan pernyataan Ganjar terkait perbedaan Idul Fitri 1444 H pada 2023 dengan menyebut bahwa perbedaan adalah hikmah dan rahmat bukan pemecah belah. Pernyataan Ganjar mengenai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika ini dilontarkan saat ia menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan 'Aisiyah Jawa Tengah Periode 2022 - 2027 di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 16 April 2023.

KESIMPULAN

Bhinneka Tunggal Ika, sekurangnya dalam penelitian ini yang menggunakan Ganjar Pranowo sebagai model, bukan semboyan yang mati melainkan semboyan yang hidup. Pernyataan Ganjar mengenai perbedaan penentuan Idul Fitri 1444 H tahun 2023 sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan tegas yang menjelaskan realitas. Pernyataan tersebut pun disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bahwa perbedaan itu adalah bukan untuk memecah melainkan untuk disyukuri. Selain itu pernyataan Ganjar bahwa Nataru (Natal dan Tahun Baru) secara berani dinyatakan untuk disikapi secara gembira oleh umat non Kristiani, bukan dalam arti menjalankan ritual yang sama, tetapi momen tersebut saat umat lain berbahagia, umat beragama lain pun seyogyanya turut berbahagia.

Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo Kota yang mengayomi seluruh kepentingan warga dalam konteks keragaman dengan secara asertif mencanangkan Jawa Tengah sebagai Kampung Bhinneka. Upaya ini bersifat operasional bukan konseptual karena dengan adanya Kampung Bhinneka, penduduk dan para tamu akan secara langsung mengetahui bagaimana sesungguhnya suasana kebhinnekaan itu. Dalam hal ini Ganjar tidak sendiri karena di Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa juga telah dibangun Kampung Pancasila.

Dapat dinyatakan bahwa tindakan dan pernyataan Ganjar sehubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika menasar pada penciptaan gairah toleransi beragama secara proporsional. Berbeda dengan Guru Nanak di India yang mencampur-adukkan ajaran Islam dengan Ajaran Hindu, toleransi yang dimaksud oleh Ganjar adalah bahwa setiap penganut agama dan kepercayaan bebas untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. Satu pihak tidak boleh menganggap paling benar sendiri sementara pihak lain salah agamanya. Dengan demikian maka toleransi beragama bukan sekadar agenda aksi untuk menaikkan pamor politik atau mendulang donasi bagi kampanye seorang politisi melainkan kebijakan yang sifatnya harus implementatif bagi setiap kepala daerah.

Dengan mengikuti model Jawa Tengah, maka perlu bagi siapa pun presiden Indonesia tahun 2024 untuk secara serius menyusun platform masa depan bagi terciptanya Indonesia yang bertoleransi sebagai jatidiri yang sustainable sifatnya.

Referensi:

- Adam, "PP Muhammadiyah Terima Silaturahmi Idul Fitri Gubernur Ganjar Pranowo" [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://muhammadiyah.or.id/pp-muhammadiyah-terima-silaturahmi-idulfitri-gubernur-ganjar-pranowo/>]
- Atkins, Jed W.. Cicero and Politics and the Limits of Reason. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, pp. 109-110.
- Bangkapos, Iklan, "Jelang Tahun Politik 2024, Ganjar Pranowo Ajak Rawat Kebhinekaan Indonesia" Rabu, 26 April 2023. [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://bangka.tribunnews.com/2023/04/26/jelang-tahun-politik-2024-ganjar-pranowo-ajak-rawat-kebhinekaan-indonesia>]
- Basri, Seta, "Politik Nature dan Nurture" [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://www.setabasri.com/2021/03/politik-nature-dan-nurture.html>]
- Basri, Seta, "Tinjauan Kritis Pemekaran Daerah: Pembentukan 8 Provinsi Baru" Jurnal Ilmu Administrasi Sandikta, Vol. VI, No. 8, April 2020, hh. 83-96.
- Boland, B. J., The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971).
- Dyah, Eka, "Jelang Nataru, Ganjar Ajak Masyarakat Tunjukkan Toleransi Beragama" 13 Desember 2022. Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-6458913/jelang-nataru-ganjar-ajak-masyarakat-tunjukkan-toleransi-beragama>]
- Hasbullah, "Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Toleransi" 17 April 2022 [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/406132/kunjungi-kampung-pancasila-ganjar-pranowo-tekankan-pentingnya-toleransi>]
- Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, "Ganjar Pranowo: Resolusi Jihad NU, Bukti Santri Bentengi NKRI" 22 Oktober 2017. [Diakses dari <https://jateng.kemenag.go.id/2017/10/ganjar-pranowo-resolusi-jihad-nu-bukti-santri-bentengi-nkri-2/> tanggal 27 April 2023].
- Kesbangpol Jawa Tengah, "Jawa Tengah Kampung Bhinneka" [Diakses tanggal 27 April 2023

- dari
<https://kesbangpol.jatengprov.go.id/new/publik/berita/NGI5N2M0NmY3Y2FhMmM5NDgzNTYyMmUwNGJmMzNiMmY4MWVmMmNkYTEwZmViY2E3MmViNWQ5MjUyOTgxMzA->
- Kusnandar, Viva Budy, "Bukan Semarang, Ini Kota Terpadat di Jawa Tengah pada Juni 2022" [11 Oktober 2022] Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/bukan-semarang-ini-kota-terpadat-di-jawa-tengah-pada-juni-2022#:~:text=Bedasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan,juta%20jiwa%20pada%20Juni%202022>. Tanggal 27 April 2023.
- Magstadt, Thomas M., *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues* (Belmont: Wadsworth, 2010) p.307.
- Maradona, Stevy, "Ganjar: Hanya 68 Persen Masyarakat Tahu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika" 4 Desember 2011. [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://news.republika.co.id/berita/lv011p/ganjar-hanya-68-persen-masyarakat-tahu-nkri-dan-bhineka-tunggal-ika>]
- Margareta, "Berpakaian Adat Ponorogo, Ganjar Sampaikan Bhinneka Tunggal Ika dan Pendidikan Karakter Anak" 26 November 2020. [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://halosemarang.id/berpakaian-adat-ponorogo-ganjar-sampaikan-bhinneka-tunggal-ika-dan-pendidikan-karakter-anak>]
- ngopibareng, "Lebaran Berbeda Tanggal, Ganjar: Bhinneka Tunggal Ika" 16 April 2023 [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://www.ngopibareng.id/read/lebaran-berbeda-tanggal-ganjar-bhinneka-tunggal-ika>]
- Nurdiyani, Netty, "Amplifikasi di dalam Maklumat Ganjar Pranowo: Kajian Linguistik Sistemik Fungsional," *Jurnal Orbith*, Vol. 16 No. 2, Juli 2020, h. pp. 132-138.
- Okezone, "Ganjar Sebut Jateng Bentengnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika" 20 April 2018. [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://daerah.sindonews.com/berita/1299612/22/ganjar-sebut-jateng-bentengnya-pancasila-dan-bhinneka-tunggal-ika>]
- Pambudi, Gilang Akbar, "Ribuan Ulama di Madura Gelar Istighosah dan Dukungan untuk Ganjar Maju di Pilpres 2024" 25 Juni 2022. [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://sindikasi.republika.co.id/berita/re1lj0456/ribuan-ulama-di-madura-gelar-istighosah-dan-dukungan-untuk-ganjar-maju-di-pilpres-2024>]
- Peters, B. Guy, *Still the Century of Bureaucracy?: The Roles of Public Servants* (Vieosoji Politika ir Administravimas, Nr. 30, 2009)
- Pramelani dan Tri Widyastuti, "Persepsi Milenial terhadap Gaya Kepemimpinan Calon Presiden Tahun 2024" *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2021, pp. 106-118.
- Pranowo, Ganjar, <https://twitter.com/ganjarpranowo/status/1607709946749284352>
- Rizaty, Monavia Ayu, "Jumlah Penduduk Jakarta Capai 10,64 Juta Jiwa pada 2022" [6 Januari 2023]. [Diakses tanggal 27 April 2023 dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penduduk-jakarta-capai-1064-juta-jiwa-pada-2022>]